

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat pesisir adalah kelompok yang tinggal di wilayah pesisir pantai dan sering kali dianggap tertinggal dibandingkan dengan kelompok lain yang lebih sejahtera, seperti pengusaha dan pedagang. Mereka sering mengalami kesulitan ekonomi dan terpengaruh oleh masalah lingkungan seperti penghancuran terumbu karang, mangrove, pencemaran, dan bencana laut. Oleh karena itu, kebijakan sosial ekonomi yang mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur perlu direvisi dan disesuaikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Sri Hadini et al., 2019). Masyarakat pesisir seperti yang berada di Pantai Purus, memiliki karakteristik tersendiri yang mempengaruhi dinamika ekonomi mereka. Umumnya, masyarakat pesisir bergantung pada sumber daya laut dan aktivitas pariwisata untuk mencari nafkah. Mereka sering kali menghadapi tantangan ekonomi seperti keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas, modal usaha yang terbatas, dan ketergantungan pada kondisi alam. Kondisi ekonomi masyarakat pesisir cenderung fluktuatif, tergantung pada musim penangkapan ikan dan jumlah wisatawan yang berkunjung. Selain itu, mereka juga menghadapi masalah akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan kewirausahaan. Dalam konteks ini, bantuan dari program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan intervensi pemerintah menjadi sangat penting untuk mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan tinggi pada sektor informal dan sumber daya alam, dibutuhkan strategi pemberdayaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim sosial ekonomi yang kondusif melalui kebijakan, pendampingan, dan penyediaan akses terhadap fasilitas publik. Selain itu, peran sektor swasta, khususnya perusahaan-perusahaan besar, juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Corporate social responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Elvirano Ardianto & Dindin M. Machfudz, 2011). Melalui program CSR, perusahaan tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk bantuan dana atau pelatihan, tetapi juga dapat berperan aktif dalam menyediakan fasilitas, layanan sosial, serta program pemberdayaan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. CSR mencakup berbagai bentuk dukungan, seperti penyediaan sarana penunjang kegiatan ekonomi, pelatihan keterampilan, bantuan infrastruktur sosial, atau peningkatan akses terhadap layanan publik dan pasar. Dengan demikian, CSR berperan penting dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Dalam konteks ini, kehadiran CSR diharapkan mampu mendorong pembangunan yang

lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan potensi besar yang dimiliki, CSR diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang menghadapi tantangan ekonomi dan sosial seperti kawasan pesisir. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam konteks ini adalah Kelurahan Purus di Kota Padang, yang memiliki karakteristik sosial ekonomi khas dan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Kelurahan Purus, yang terletak di Kecamatan Padang Barat, merupakan salah satu wilayah pesisir di Kota Padang yang memiliki potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan usaha mikro. Pantai Purus sebagai ikon wisata lokal menghadirkan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Namun demikian, meskipun memiliki potensi geografis yang strategis, masyarakat di wilayah ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk dalam hal pemberdayaan ekonomi dan penguatan kapasitas usaha. Seperti yang terjadi pada masyarakat sekitar Danau Cimpago, Dimana pemberian bantuan oleh dinas pariwisata yaitu tempat berdagang untuk masyarakat sekitar, justru disewakan pada pihak luar. Sehingga ekonomi masyarakat lokal sekitar tetap stagnan dan tidak menunjukkan perkembangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir seperti di Kelurahan Purus membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta, dalam bentuk program pemberdayaan yang berkelanjutan dan kontekstual.

Program CSR PT. PLN (Persero) secara nasional dijalankan dalam kerangka Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program ini bertujuan untuk

mendorong kemandirian masyarakat, mendukung pengembangan usaha lokal, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional PLN (PT PLN, n.d.). Di Kota Padang, termasuk di Kelurahan Purus, PLN telah menyalurkan bantuan dalam berbagai bentuk, seperti peralatan usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan komunitas. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya yang memiliki keterbatasan akses terhadap program pemberdayaan konvensional.

Sejak tahun 2018, PT PLN (Persero) melalui program PLN Peduli telah menjalankan berbagai kegiatan tanggung jawab sosial di Kelurahan Purus. Pada tahun tersebut, PLN memberikan bantuan untuk renovasi fasilitas milik Komunitas Tanah Ombak, sebuah komunitas literasi yang fokus membina anak-anak di lingkungan sosial rentan. Kemudian, pada tahun 2019, dilaksanakan program pelatihan keterampilan menjahit bagi kelompok perempuan, yang disertai dengan pemberian mesin jahit sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Pada tahun 2021, PLN kembali memberikan bantuan berupa motor listrik kepada Tanah Ombak guna menghidupkan kembali kegiatan pustaka keliling, meskipun tidak sesuai sepenuhnya dengan permintaan awal penerima. Terakhir, pada Juli 2024, PLN mengadakan aksi bersih pantai dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Internasional. Kegiatan ini melibatkan masyarakat sekitar, pedagang, dan pihak kelurahan serta mencakup pemberian sarana pendukung seperti tong sampah dan gerobak sampah. Meskipun berbagai bantuan telah diberikan, pemanfaatan bantuan tersebut masih belum menunjukkan hasil yang maksimal,

sehingga penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pemanfaatan bantuan tersebut agar dampaknya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat penerima di Kelurahan Purus. Meskipun bentuk bantuan yang diberikan cukup beragam, kenyataannya di lapangan masih dijumpai berbagai kendala yang membuat pemanfaatannya tidak optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya mengkaji lebih dalam mengenai hambatan yang dihadapi oleh penerima bantuan. Dalam implementasinya, bantuan CSR tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Kelurahan Purus. Kondisi ini mengarah pada dugaan adanya hambatan-hambatan tertentu yang mempengaruhi proses pemanfaatan bantuan CSR.

Hambatan adalah suatu objek, benda, kegiatan, atau situasi yang menyebabkan suatu halangan, menyebabkan kesulitan, gangguan atau suatu ketidakteraturan dalam rangka mencapai tujuan yang seharusnya. Dari perspektif ini maka suatu hambatan akan menimbulkan berbagai dampak lain yang semakin kompleks serta akhirnya membuat tujuan tidak dapat dicapai (Muhammad Nur Wangid & Sugiyanto, 2013). Tantangan tersebut tidak hanya berupa keterbatasan modal dan akses teknologi, tetapi tantangan struktural dan kultural yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan bantuan dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan oleh perusahaan maupun pemerintah. Hambatan yang bersifat struktural, seperti kurangnya pendampingan teknis, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan infrastruktur, dan distribusi bantuan yang tidak merata. Selain itu, hambatan juga bersumber dari fakta sosial non-material yang telah mengakar, seperti norma ekonomi pragmatis yang

secara kolektif memaksa masyarakat untuk lebih memilih hasil instan daripada proses jangka panjang, rendahnya inisiatif lokal, serta kurangnya kesesuaian antara program CSR dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami hambatan-hambatan tersebut agar bantuan CSR dapat dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi (2023) terdapat hambatan struktural dan kultural yang signifikan dalam pengembangan pariwisata pesisir di kawasan Pantai Purus. Salah satu hambatan struktural pada UMKM yang berada di kawasan Pantai Purus adalah kurangnya fasilitas tempat berdagang yang representatif untuk pedagang yang direlokasi. Selain hambatan struktural, terdapat pula hambatan kultural yang mempengaruhi UMKM di Pantai Purus yaitu UMKM tersebut belum berjalan dengan baik, meskipun memiliki potensi pariwisata seperti *elo pukek* (menarik pukat untuk menangkap ikan di laut dari bibir pantai) yang merupakan tradisi turun-temurun bagi nelayan di pesisir Ranah Minang. Produk pariwisata seperti baju-baju pantai yang menggambarkan *elo pukek* atau olahan makanan dari hasil *elo pukek* juga tidak berkembang dengan baik.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program CSR dengan implementasi di lapangan. Bantuan yang telah diberikan tidak serta-merta mampu menjawab tantangan yang ada, karena terjadi benturan antara struktur program CSR yang formal dengan fakta-fakta sosial yang telah mengakar di masyarakat. Hambatan seperti kurangnya pendampingan teknis, minimnya akses terhadap pasar,

serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan program tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini diperparah oleh adanya norma ekonomi pragmatis yang memaksa masyarakat untuk memprioritaskan hasil jangka pendek. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi, bukan hanya pada proses, tetapi juga pada nilai sosial nyata yang dihasilkan. Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai hambatan-hambatan ini, muncul kesenjangan besar antara sumber daya yang telah diinvestasikan oleh perusahaan dengan dampak sosial berkelanjutan yang nyata dirasakan oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya berisiko membuat program CSR tidak mencapai sasaran, tetapi juga mempertanyakan efektivitas investasi sosial yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai hambatan-hambatan yang muncul dalam pemanfaatan bantuan CSR di Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan program CSR. Dengan memahami hambatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi yang dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan program CSR di masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pihak manapun dalam merancang pendekatan yang lebih tepat dan kontekstual terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Purus, khususnya pihak-pihak yang menerima bantuan CSR dari PT.PLN (Persero). Objek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang menerima bantuan dari Program CSR PT.PLN (Persero) di Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi hambatan dalam pemanfaatan bantuan CSR. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pemanfaatan bantuan CSR PT.PLN (Persero) di Kelurahan Purus, Kota Padang. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: **“Apa Hambatan Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Bantuan CSR PT. PLN (PERSERO) Di Kelurahan Purus, Kota Padang?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hambatan dalam pemanfaatan bantuan CSR PT. PLN (Persero) di Kelurahan Purus, Kota Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk ketidakefektifan bantuan CSR PT. PLN (Persero) di Kelurahan Purus, Kota Padang.

2. Mendeskripsikan hambatan dalam pemanfaatan bantuan CSR PT. PLN (Persero) di Kelurahan Purus, Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang hambatan dalam pemanfaatan CSR terutama di Kelurahan Purus, Padang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang teori yang berkaitan dengan CSR serta menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi di bidang ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi perusahaan dan pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan program CSR yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas lokal dalam penyaluran dan pelaksanaan program CSR.

1.5 Tinjauan Pustaka

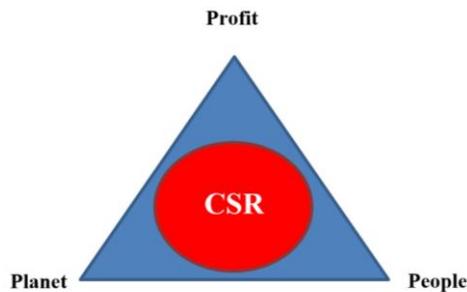
1.5.1 *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk kontribusi nyata dari dunia usaha terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak secara ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatannya. European Union mendefinisikan CSR sebagai sebuah konsep yang mana perusahaannya didasarkan pada prinsip-prinsip sukarela dan memasukkan berbagai masalah sosial dan

lingkungan ke dalam operasional bisnisnya serta interaksi dengan para pemangku kepentingan.

Dalam praktiknya di Indonesia CSR diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang- Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umumnya. Selain itu beberapa aturan hukum juga mengatur bagaimana pelaksanaan CSR di Indonesia seperti Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Beberapa aturan hukum diatas menunjukan dan menegaskan bahwa CSR pada saat ini merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan.

Seperti yang dijelaskan oleh John Elkington (Elvirano Ardianto & Dindin M. Machfudz, 2011), bahwa prinsip pelaksanaan program CSR harus mengacu kepada konsep Triple Bottom Line, yaitu keseimbangan dalam menjaga kelestarian lingkungan yang berada disekitar wilayah operasi (*planet*), juga memberikan manfaat kepada masyarakat (*people*), serta perusahaan mendapatkan nilai untuk menjaga kelangsungan operasinya (*profit*).



Gambar 1. 1 Tri Bottom Line

Sumber: Elkington (Elvirano Ardianto & Dindin M. Machfudz, 2011)

Konsep tersebut menjelaskan bahwa jika perusahaan ingin berkelanjutan (*sustainable*), maka perlu memperhatikan 3P, yaitu perusahaan tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan (*profit*), namun juga harus memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat (*people*) dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Konsep triple bottom line tersebut adalah kelanjutan dari konsep sustainable development yang secara eksplisit telah mengaitkan dimensi dari tujuan dan tanggung jawab perusahaan, baik kepada *shareholder* maupun *stakeholder* (Nor Hadi, 2014)

a. *Profit*

Profit merupakan unsur yang paling penting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Profit pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit diantaranya dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga Perusahaan

mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah secara maksimal.

b. *People*

Masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan, dan perkembangan perusahaan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Operasi perusahaan tentu memberikan dampak kepada masyarakat, oleh karena itu perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat (Yusuf Wibisono, 2007)

c. *Planet*

Realitas yang sering terjadi di lapangan memperlihatkan bahwa banyak pelaku industri yang hanya mementingkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Dengan melestarikan lingkungan, mereka justru akan memperoleh keuntungan yang lebih besar, terutama dari sisi kesehatan, disamping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya (Yusuf Wibisono, 2007).

Memperoleh keuntungan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sesuatu yang penting, namun tidak kalah pentingnya juga untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Disinilah perlunya menerapkan konsep *triple bottom Line*, yaitu *profit*, *people*, dan *planet*. Dengan kata lain, fokus sebuah bisnis bukan hanya

profit (laba) saja, tetapi juga *people* (manusia) dan *planet* (lingkungan) (Yusuf Wibisono, 2007). Merujuk pada (Zaim Saidi & Hamid Abidin, 2004) dalam praktiknya ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:

a. Keterlibatan langsung

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.

b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharmam Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund.

c. Bermitra dengan pihak lain

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/ organisasi non-pemerintah (NGO /LSM), instansi pemerintah, universitas atau media

massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/organisasi non-pemerintah yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompot Dhuafa, instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos, universitas (UI, ITB, IPB), media massa (Kompas, Kita Peduli Indosiar).

d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama (Zaim Saidi & Hamid Abidin, 2004).

Dalam pelaksanaanya CSR membutuhkan ide dan strategi. Ketika melaksanakan program CSR, perusahaan harus memulai dengan menetapkan arah dan lingkup jangka panjang penerapan CSR. Perusahaan juga harus mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pasar dan harapan para stakeholder. Sebuah strategi CSR yang baik harus mampu mengidentifikasi arah kebijakan CSR secara keseluruhan dan kemudian menentukan langkah-langkah yang diperlukan. Strategi

CSR akan membantu perusahaan untuk memastikan pelaksanaan CSR yang dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan (Alfonsus B. Susanto, 2009)

1.5.2 Bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility*

Praktik CSR di Indonesia mengambil dua bentuk. Pertama, tanggung jawab institusional perusahaan yang terikat dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, BUMN disyaratkan memberikan sumbangan dari keuntungan tahunan, atau pengusaha hak penguasaan hutan (HPH) diwajibkan melaksanakan program pembinaan masyarakat desa hutan. Kedua, tanggung jawab sukarela yang tidak terikat dengan peraturan perundang-undangan, tetapi dianggap penting dikerjakan perusahaan, baik oleh kebutuhan internal perusahaan maupun pertimbangan moral, sosial dan kemanusiaan. Jika di Indonesia CSR masih dianggap program 'iseng-iseng berhadiah', maka pada beberapa negara industri maju, CSR sudah menjadi bagian penting dari strategi bisnis.

Implementasi CSR di beberapa negara kiranya dapat dijadikan referensi. Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat, telah mengadopsi *code of conduct* CSR yang meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, jender, korupsi, dan hak asasi manusia (HAM). Berbasis pada aspek itu, maka negara mengembangkan regulasi guna mengatur CSR tersebut. Di Australia, misalnya, perusahaan diwajibkan membuat laporan CSR dan mengatur standarisasi lingkungan hidup, hubungan industrial dan HAM. Sementara itu, Kanada mengatur CSR dalam aspek kesehatan, hubungan industrial, dan proteksi lingkungan. Belajar

dari pengalaman di negara- negara tersebut dan mengacu pada internalisasi externality, maka CSR perlu diatur secara formal.

CSR korporasi yang selama ini dilakukan berdasarkan prinsip sukarela (voluntary) dan kedermawanan (philanthropy) dinilai sudah tidak relevan lagi. Inilah kegelisahan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam pertemuan *Global Compact* di Jenewa, Swiss. Korporasi dianggap tidak mempunyai kepedulian terhadap persoalan sosial seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan komunitas. Demikian juga halnya di Indonesia. Pencantuman kewajiban CSR bagi perusahaan dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan Undang- Undang Penanaman Modal, banyak ditentang oleh korporat. Masyarakat mempunyai hak atas keuntungan yang didapat oleh korporasi karena masyarakat sesungguhnya 'pemegang saham' bagi wilayah hukum yang dijadikan operasional korporasi. Menolak kehadiran korporasi yang dikategorikan masuk 'daftar hitam' merupakan tindakan yang bijak dan baik demi kemanusiaan, walaupun kadang sulit melakukannya sebab korporasi sangat lihai menyuap pejabat negara untuk mendapatkan izin operasi.

Kegiatan CSR korporat merupakan salah satu dedikasi perusahaan sebagai upaya 'balas budi' kepada *stakeholder* (publik pemangku kepentingan) yang memerlukan pemberdayaan supaya lebih maju, setelah sang korporat meraup keuntungan cukup banyak dalam kiprah bisnisnya. Banyak kegiatan CSR. korporat untuk publik eksternal, seperti meningkatkan kemampuan sumber daya manusia para pengrajin yang ada di sekitar perusahaan, apakah itu dengan mengadakan pelatihan, cara membuat

pembukuan, penerimaan dan penjualan yang sesuai dengan standar, pelatihan membuka pasar baru dengan cara membuat media online (*cyber marketing*, dengan tujuan *selling product* dan *cyber public relations* dengan tujuan *image building* atau membangun citra merek atau citra produk). Kegiatan lainnya yang juga dapat dilakukan, misalnya, membantu fasilitas perpustakaan sekolah agar meningkatkan wawasan para siswa, memberikan bimbingan belajar gratis masuk perguruan tinggi. Banyak sekali program CSR korporat yang lebih berorientasi ke publik eksternal. Memang perlu dibuat strategi pencitraan korporat melalui CSR, dalam bentuk planning dan programming yang matang dengan melakukan langkah-langkah: pengenalan situasi, penetapan. tujuan, definisi publik, pemilihan media dan teknik PR, perencanaan anggaran, dan pengukuran hasil. Kegiatan CSR sendiri bisa dalam tiga bentuk: events, campaign, program. Sementara perusahaan lain, memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada industri kecil dan menengah dalam memilih dan mengolah bahan baku logam untuk memproduksi parts atau suku cadang sepeda motor dan mobil. Perusahaan juga memberikan pelatihan keterampilan pengecatan dan pengelasan yang terbaik yang dibutuhkan oleh dunia otomotif, serta pemasaran, permodalan, dan penataan pelaporan keuangan yang baik (Elvirano Ardianto & Dindin M. Machfudz, 2011).

1.5.3 PT. PLN (Persero)

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang lebih dikenal sebagai PT PLN (Persero), adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab

menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum di Indonesia. Sejarah PLN bermula pada masa awal kemerdekaan Indonesia ketika pemerintah membentuk Jawatan Listrik dan Gas pada tahun 1945 di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kelistrikan nasional, PLN mengalami perubahan struktural hingga akhirnya secara resmi ditetapkan sebagai Perseroan Terbatas pada tahun 1994 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan energi listrik di seluruh wilayah Indonesia (PT PLN (Persero), 2023).

Visi PT PLN (Persero) adalah menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di dunia, masuk dalam jajaran 500 perusahaan global teratas dan menjadi pilihan utama pelanggan dalam solusi energi. Misi perusahaan mencakup penyelenggaraan bisnis kelistrikan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, penggerak kegiatan ekonomi, serta penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan. PLN juga mengusung nilai-nilai AKHLAK yang menekankan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai budaya perusahaan yang mendukung pencapaian visi dan misinya (PT PLN (Persero), 2023).

Selain fungsi utamanya menyediakan listrik, PLN juga menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berorientasi pada tiga pilar utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Program TJSL ini bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan dengan cara memberdayakan masyarakat melalui bantuan kepada pelaku UMKM, pelatihan

keterampilan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil (PT PLN (Persero), 2023).

Keberhasilan pelaksanaan program CSR PLN mendapat pengakuan melalui berbagai penghargaan, salah satunya adalah TOP CSR Awards pada tahun 2023, dimana PLN menerima 39 penghargaan sekaligus termasuk Top CSR Golden Trophy sebagai pemenang predikat bintang lima selama tiga tahun berturut-turut. Penghargaan ini menunjukkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan program CSR PLN dalam memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat (PT PLN (Persero), 2023).

Program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan oleh PLN juga mencakup inisiatif seperti "Perempuan Berdaya" yang fokus pada peningkatan kemandirian ekonomi perempuan melalui pelatihan dan pendampingan, serta "Electrifying Agriculture" yang membantu pelaku usaha agrikultur beralih menggunakan listrik untuk operasional usaha mereka. Program-program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tetapi juga mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah di tingkat lokal (PT PLN (Persero), 2023).

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan dampak program CSR, PLN telah mengadopsi prinsip *Creating Shared Value* (CSV) serta mengacu pada pedoman internasional ISO 26000 untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Pendekatan ini memastikan bahwa kegiatan CSR PLN dilakukan secara sistematis,

terukur, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan (Ahmad Churi, 2021).

Kontribusi PLN terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga meluas ke bidang sosial dan lingkungan. Program-program seperti penyediaan sarana air bersih, pelestarian flora dan fauna, serta pemanfaatan sampah menjadi energi merupakan bagian dari upaya PLN dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Inisiatif seperti Rumah BUMN juga berperan dalam pengembangan kapasitas UMKM dan penciptaan lapangan kerja baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Arifah, 2024).

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Dalam penelitian ini, kerangka analisis untuk memahami hambatan pemanfaatan bantuan CSR menggunakan teori fakta sosial dari Émile Durkheim. Teori ini sangat relevan karena Durkheim menegaskan bahwa sosiologi harus berfokus pada fakta sosial (social facts), yaitu fenomena yang memiliki realitasnya sendiri, terpisah dari individu. Menurut Durkheim, fakta sosial adalah "setiap cara bertindak, baik tetap maupun tidak, yang dapat memberikan tekanan eksternal pada individu".

Keunggulan analitis teori ini bersumber dari identifikasi tiga karakteristik fundamental fakta sosial, yaitu:

- a. Eksternalitas: fakta sosial berada di luar kesadaran individu. Ia sudah ada sebelum individu lahir dan akan terus ada, seperti hukum, moralitas, dan norma budaya.

- b. Koersif (Memaksa): Ini adalah karakteristik krusial. Fakta sosial memiliki kekuatan untuk memaksa individu agar patuh. Paksaan ini tidak selalu bersifat hukuman formal, tetapi bisa berupa sanksi sosial informal atau tekanan kolektif yang membuat individu merasa harus mengikuti arus yang ada. Individu tidak sepenuhnya bebas bertindak sesuai keinginannya karena dibatasi oleh struktur sosial ini.
- c. Generalitas: Fakta sosial bersifat umum dan menyebar di seluruh masyarakat, bukan fenomena individual.

Ketiga karakteristik fundamental inilah yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana struktur sosial di Kelurahan Purus beroperasi dan memberikan tekanan terhadap individu. Selanjutnya, Durkheim membagi fakta sosial menjadi dua jenis yang akan digunakan untuk membedah masalah penelitian:

- a. Fakta Sosial Material: Sesuatu yang dapat diamati dan disentuh, seperti institusi, hukum, dan birokrasi. Dalam konteks ini, program CSR PT. PLN (Persero) dengan segala kebijakannya, peralatannya (mesin jahit, motor listrik), dan prosedur pelaksanaannya dapat dipandang sebagai sebuah fakta sosial material yang coba diperkenalkan ke dalam masyarakat Kelurahan Purus.
- b. Fakta Sosial Non-Material: Sesuatu yang bersifat gagasan, ide, atau kesadaran kolektif, seperti moralitas, norma, dan nilai-nilai budaya. Dalam penelitian ini, fakta sosial non-material termanifestasi dalam bentuk pola pikir pragmatis

masyarakat pesisir yang mengutamakan hasil instan, persepsi negatif dan stigma terhadap pihak luar, serta norma keterlibatan anak dalam ekonomi keluarga. Fakta-fakta sosial non-material inilah yang sudah mengakar kuat dan menjadi kesadaran kolektif (conscience collective) di Kelurahan Purus.

Dengan demikian, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana fakta sosial material baru yang diperkenalkan melalui program CSR PT. PLN (Persero) berbenturan dengan fakta sosial non-material lama yang sudah ada dan mengakar kuat di masyarakat. Hambatan pemanfaatan bantuan CSR tidak lagi dilihat sebagai kegagalan individu semata, melainkan sebagai hasil dari tekanan (koersi) struktur sosial yang ada, yang memaksa individu untuk tidak memanfaatkan program jangka panjang meskipun fasilitasnya telah disediakan.

1.5.5 Penelitian Relevan

Dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dukungan dari penelitian sebelumnya. Penelitian relevan adalah penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini sangat dibutuhkan. Hasil dari penelitian sebelumnya dijadikan pedoman dan perbandingan yang dilakukan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu Sebagian berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

No	Penelitian	Judul Penelitian	Masalah	Tujuan	Hasil
1.	Rinaldi Eka Putra, M. Fedro Syafiola. 2023. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. Jurnal Justitia(2023)	Hambatan Struktural dan Kultural Pengembangan Pariwisata Pesisir di Kawasan Pantai Purus Kota Padang	Kurangnya efektivitas pengembangan pariwisata Pantai Purus akibat hambatan struktural dari pemerintah dan hambatan kultural dari masyarakat.	Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hambatan struktural dan kultural dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Purus	Hambatan struktural berasal dari kebijakan pemerintah, relokasi pedagang, minimnya fasilitas dan dana kelurahan. Hambatan kultural meliputi UMKM tidak berkembang, kesadaran kebersihan
2.	Ika Setyorini dkk. (2021)	Strategi Komunikasi CSR PT PLN (Persero) terhadap Komunitas Nelayan di Perairan Pulau Panjang	Komunikasi antara pihak PLN dan komunitas nelayan belum berjalan efektif dalam pelaksanaan CSR.	Untuk mengetahui strategi komunikasi CSR dan penerimaan masyarakat pesisir terhadap program PLN.	Hambatan dalam komunikasi menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program, serta partisipasirendah.
3.	Mahsa Agna Yardani (2025), Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram (Mahsa Agna Yardani, 2025)	Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT PLN (Persero) Kota Mataram	Program CSR belum berjalan optimal karena kurangnya koordinasi, evaluasi, dan keterlibatan masyarakat.	Untuk mengetahui implementasi program CSR oleh PT PLN di Mataram dan hambatan pelaksanaannya.	CSR telah dilaksanakan sesuai prosedur, tetapi partisipasi masyarakat rendah, program kurang berkelanjutan, dan pemantauan masih terbatas.

4.	Maygsi Aldian Suwandi, dkk. (Maygsi Aldian Suwandi et al., 2024)	Implementasi Program CSR Benyamin Village PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Bagaimana implementasi program CSR PLN dalam memberdayakan masyarakat pesisir di Kampung Sembilangan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.	Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program CSR berbasis ekowisata dan dampaknya terhadap pemberdayaan serta kesejahteraan masyarakat pesisir.	Program Benyamin Village memberikan dampak positif dalam bentuk peningkatan kapasitas masyarakat, perbaikan akses air bersih, pendapatan tambahan, serta pengembangan potensi lokal. bantuan dan kurangnya indikator keberhasilan program.
----	--	---	--	--	--

Sumber: Data Primer 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan keempat penelitian sebelumnya karena sama-sama membahas program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan oleh PT PLN (Persero) di wilayah masyarakat pesisir. Kesamaan utama terletak pada fokus terhadap hambatan pelaksanaan program, efektivitas, serta keterlibatan masyarakat penerima bantuan. Penelitian Mahsa Agna Yardani dan Ika Setyorini dkk. menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR PLN sering menghadapi tantangan dari aspek partisipasi masyarakat dan komunikasi sosial. Sementara itu, penelitian oleh Rinaldi Eka Putra dan M. Fedro Syafiola relevan dari sisi lokasi karena sama-sama dilakukan di kawasan Pantai Purus, meskipun objek kajiannya berfokus pada sektor pariwisata.

Penelitian oleh Maygsi Aldian Suwandi dkk. juga mengkaji pelaksanaan CSR di masyarakat pesisir namun menitikberatkan pada program berbasis ekowisata. Perbedaan mendasar dari penelitian ini adalah fokusnya yang lebih spesifik pada hambatan dalam pemanfaatan bantuan CSR dari PT PLN (Persero) oleh penerima bantuan di Kelurahan Purus. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengedepankan analisis struktur dan agen melalui teori strukturasi Giddens, yang belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi akademik yang penting dalam memperkaya kajian sosiologis tentang CSR.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai jenis penelitian yang mendeskripsikan suatu permasalahan dan berharap dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Anselm Strauruss & Juliet Corbin, 2013). Sedangkan menurut Afrizal, metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan ataupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

Data yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian ini berupa gambaran, penjelasan, deskripsi kata-kata dan tindakan yang dilakukan informan (Afrizal, 2014).

Penggunaan penelitian kualitatif ini didasarkan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif dirasa lebih tepat menjawab masalah penelitian yang peneliti lakukan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi dilapangan serta data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Dengan tipe penelitian ini dapat mengungkapkan proses kejadian secara mendetail. Maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif ini dikarenakan peneliti menganalisis dan mengumpulkan data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) serta mengamati secara lebih detail terkait hambatan yang dialami Masyarakat Kelurahan Purus dalam pemanfaatan bantuan CSR.

1.6.2 Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan informan sebagai subjek penelitian. Menurut (Afrizal, 2014) informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan informasi yang berasal dari dirinya sendiri maupun orang lain dan dari kejadian atau suatu hal yang telah terjadi. Untuk mendapatkan informan yang kompeten dengan masalah penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menetapkan kriteria tertentu dengan karakteristik atau pertimbangan- pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian

serta keadaan informan yang diketahui oleh peneliti. Kriteria informan dalam penelitian ini merupakan:

1. Pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program CSR PT. PLN (Persero) di Kelurahan Purus.
2. Merupakan individu atau perwakilan lembaga yang secara langsung menerima manfaat dari program CSR PT. PLN (Persero) di Kelurahan Purus.
3. Memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam proses implementasi dan dampak program CSR PT. PLN (Persero) di Kelurahan Purus, baik dari unsur pemerintah, dinas terkait, maupun tokoh masyarakat.

Menurut Afrizal (Afrizal, 2014) terdapat dua kategori informan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Informan Pelaku

Informan pelaku yaitu informan yang memberikan informasi tentang dirinya sendiri, perbuatannya, pikirannya hingga pengalamannya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Mereka adalah subjek penelitian serta sumber data utama dalam penelitian. Setelah melakukan pencarian informan yang disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan, maka informan pelaku yang peneliti dapatkan dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Informan Pelaku

NO	NAMA	PEKERJAAN
1	Dodi Kurniawan	Asisten Manajer TJSL PLN
2	Desmora	Peserta pelatihan menjahit
3	P S	Peserta pelatihan menjahit
4	R	Peserta pelatihan menjahit
5	Syuhendri	Pengelola Tanah Ombak

Sumber: Data Primer 2025

Dari Tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa peneliti menetapkan lima orang sebagai informan pelaku. Kelima informan tersebut dipilih karena keterlibatan langsung mereka dalam program CSR PT. PLN (Persero) sehingga dapat memberikan data primer yang kaya dari berbagai perspektif. Bapak Dodi Kurniawan memberikan sudut pandang dari sisi korporat sebagai perencana dan penanggung jawab program. Sementara itu, Ibu Desmora, Ibu P S, dan Ibu R mewakili pengalaman masyarakat sebagai peserta langsung dari program pelatihan. Posisi Bapak Syuhendri sebagai Pengelola Komunitas Tanah Ombak menjadi krusial karena ia berperan ganda, baik sebagai penerima bantuan untuk komunitasnya maupun sebagai fasilitator program di lapangan, sehingga mampu memberikan pandangan yang menjembatani antara pihak PLN dan masyarakat

b. Informan Pengamat

Informan pengamat yaitu informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti. Informan pengamat ini boleh jadi bukan orang yang diteliti atau pelaku kejadian yang diteliti atau mereka ini dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian. Informan pengamat dalam penelitian ini meliputi tokoh

Masyarakat di Kelurahan Purus, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Lembaga pendukung program CSR PT. PLN (Persero) di kelurahan purus (Dinas Lingkungan Hidup), serta masyarakat di sekitar lingkungan Pantai Cimpago. Informan pengamat yang memberikan informasi mengenai sudut pandang dan pengamatan mereka terhadap pemanfaatan bantuan CSR PT.PLN (Persero) di Kelurahan Purus, Kota Padang dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Informan Pengamat

NO	NAMA	PEKERJAAN
1	Anwar	Lurah Purus
2	Musliadi	PJ Dinas Koperasi UMKM
3	Doni	Petugas Dinas Lingkungan Hidup
4	Feby	Pedagang di Pantai Cimpago

Sumber: Data Primer 2025

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, peneliti menetapkan enam orang sebagai informan pengamat. Pemilihan para informan ini bertujuan untuk memperoleh pandangan yang lebih luas serta memvalidasi data yang didapatkan dari informan pelaku. Komposisi informan pengamat ini sengaja dibuat beragam untuk mencakup berbagai perspektif: Bapak Anwar selaku Lurah Purus memberikan konteks dari sisi pemerintahan dan sosial kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Bapak Musliadi dari Dinas Koperasi UMKM serta Bapak Doni dari Dinas Lingkungan Hidup memberikan wawasan teknis dari dinas terkait. Terakhir, Saudari Feby yang merupakan pedagang di Kawasan sekitar Pantai Cimpago memberikan sudut pandang dari warga yang mengamati

langsung dinamika sehari-hari di lokasi penelitian. Dengan demikian, informasi dari para pengamat ini berfungsi untuk memperkaya dan menguatkan analisis penelitian.

1.6.3 Data yang Diambil

Data penelitian kualitatif, data yang dijadikan sumber penelitian adalah kata-kata dan tindakan manusia untuk dianalisis. Sugiyono (Sugiyono, 2016) membagi data penelitian menjadi dua jenis:

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber pertama yang dimaksudkan disini adalah hasil wawancara langsung dengan penanggung jawab program CSR PLN Peduli di kelurahan Purus, peserta pelatihan menjahit, dan pengurus komunitas tanah ombak. Data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan informan terkait penerima bantuan CSR dari program PLN Peduli. Data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti berupa pernyataan informan mengenai hambatan dalam pemanfaatan bantuan CSR dari PLN Peduli.

2. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dapat berupa data yang diperoleh melalui studi dokumen yang memuat informasi penelitian terkait. Data sekunder dapat dikatakan juga sebagai data pelengkap yang digunakan untuk memperkaya data penelitian. Data sekunder bertujuan untuk membantu peneliti memberikan konteks dan pemahaman yang lebih luas mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder pada penelitian ini

diperoleh melalui data yang didapat dari pihak PLN Peduli. Selain itu, terdapat data berupa dokumen yang diperoleh melalui jurnal, skripsi, website, artikel, dan buku yang terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan yang bertujuan untuk menambah referensi penelitian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menganalisis kata-kata yang menyatakan alasan-alasan, interpretasi atau makna-makna, kejadian, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara individu, ataupun kelompok sosial. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab masalah penelitian. Dalam mendapatkan data yang valid dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang harus memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara Mendalam

Dalam penelitian kualitatif wawancara dilakukan seperti dua orang sedang bercakap tentang sesuatu (Afrizal, 2014). Wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses penggalian informasi secara mendalam, terperinci dan terbuka yang bertujuan mencapai tujuan penelitian. Dalam wawancara mendalam ini perlu dilakukan berulang ulang kali dikarenakan peneliti tidak memiliki alternatif jawaban dalam setiap pertanyaan dengan tujuan untuk mendalami informasi dari seorang informan. Berulang

kali ini yaitu lebih mengklarifikasi informasi yang telah didapat atau mendalami hal-hal yang muncul dalam mewawancara sebelumnya dengan seorang informan (Afrizal, 2014). Teknik wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini agar peneliti dapat memperoleh informasi secara mendalam mengenai hambatan apa saja yang terjadi kepada masyarakat atau pihak-pihak di Kelurahan Purus yang menerima dan memanfaatkan bantuan CSR dari PT PLN (Persero). Prosedur yang dilakukan dalam wawancara mendalam ialah diawali dengan peneliti membuat janji terlebih dahulu dengan informan kemudian membuat kesepakatan awal terkait dengan menentukan jadwal wawancara yang akan dilakukan serta membuat daftar pertanyaan yang akan ditanya dalam wawancara. Jika wawancara pertama yang dilakukan tidak selesai atau pertanyaan penelitian belum terjawab, maka peneliti akan mengatur kembali jadwal wawancara dengan informan untuk menyelesaikan wawancara dan menjawab semua daftar pertanyaan penelitian. Alat yang digunakan ketika wawancara mendalam berupa pedoman wawancara, alat tulis, alat rekaman seperti recorder, dan alat lainnya yang mendukung pengambilan data hasil wawancara mendalam.

b. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung aktivitas informan di lapangan. Untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau sedang dilakukan, peneliti perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan sendiri, atau merasakan sendiri (Afrizal, 2014). Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, peneliti melakukan observasi untuk mengamati secara langsung kondisi fisik dari bantuan

CSR, aktivitas pemanfaatan bantuan oleh masyarakat, serta dinamika sosial di lingkungan Kelurahan Purus yang berkaitan dengan topik penelitian. Secara spesifik, pengamatan difokuskan pada kondisi mesin jahit pasca-pelatihan, aktivitas di Tanah Ombak, serta kondisi kebersihan dan penggunaan fasilitas lingkungan di sekitar Pantai Cimpago. Observasi ini bertujuan untuk memperkuat dan memvalidasi data yang diperoleh melalui wawancara mendalam.



Gambar 1. 2 Hasil Observasi Lapangan
Sumber: Data Primer 2025

c. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis seperti berita di media, notulensi, surat menyurat dan laporan informasi yang terkait (Afrizal, 2014). Untuk mengecek ketepatan informasi yang didapat, peneliti juga harus mengecek kebenarannya dengan melakukan wawancara mendalam. Dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan untuk mencocokkan informasi yang ada dilapangan. Dokumen yang dikumpulkan dalam

penelitian ini dokumen internal dari PT. PLN (Persero) seperti laporan monitoring program, artikel berita dari media daring yang relevan, foto-foto dokumentasi hasil observasi lapangan, surat izin penelitian, serta data sekunder lainnya yang mendukung analisis.

1.6.5 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dilaksanakan secara sistematis dan adaptif, dimulai setelah tahap seminar proposal. Berdasarkan masukan dari dosen pembimbing dan penguji, fokus penelitian dikerucutkan untuk mengkaji program CSR dari satu perusahaan spesifik di Kelurahan Purus, yaitu PT. PLN (Persero). Tahapan ini diawali dengan penyempurnaan rancangan penelitian dan revisi pedoman wawancara untuk memastikan relevansi pertanyaan dengan tujuan penelitian.

Tahap pengumpulan data di lapangan dimulai pada 13 Februari 2025 dengan pengajuan surat izin penelitian ke kantor PT. PLN (Persero) UID Sumatera Barat. Namun, pada tahap awal ini peneliti menghadapi kendala prosedural yang signifikan. Pihak administratif PLN menginformasikan bahwa akses untuk data penelitian mensyaratkan peneliti untuk mengikuti program magang minimal satu bulan atau mendapatkan rekomendasi internal. Setelah melaporkan kendala ini kepada dosen pembimbing pada 24 Februari 2025, peneliti disarankan untuk mengubah strategi dengan memulai pengumpulan data dari tingkat pemerintah lokal dan penerima manfaat langsung yang sudah teridentifikasi, seperti komunitas Tanah Ombak.

Sembari mengupayakan akses ke PLN, peneliti mulai melakukan wawancara di lapangan. Proses perizinan di tingkat pemerintah daerah juga menemui kendala birokrasi; surat izin lanjutan dari Kantor Camat Padang Barat yang dijanjikan selesai dalam dua hari, baru dapat diperoleh setelah satu minggu pada tanggal 21 Maret 2025, setelah peneliti melakukan tindak lanjut sebanyak tiga kali.

Sebuah titik terang muncul pada 16 April 2025, ketika peneliti secara tidak sengaja bertemu dengan salah seorang pegawai PT. PLN yang kemudian memberikan rekomendasi untuk mempermudah akses penelitian. Berkat rekomendasi tersebut, surat izin penelitian dari PT. PLN akhirnya diterbitkan pada 29 April 2025. Meskipun demikian, proses pengumpulan data di internal PLN tetap menghadapi serangkaian tantangan baru. Koordinator pertama yang ditunjuk merupakan pegawai yang baru bergabung dengan tim CSR pada tahun 2018, sehingga data program sebelum tahun tersebut sulit diakses. Tidak lama kemudian, koordinator tersebut dipindahtugaskan ke luar kota, sehingga peneliti harus berkoordinasi dengan pengganti yang baru.

Puncak dari proses ini adalah upaya untuk menjadwalkan wawancara dengan informan kunci dari pihak PLN, yaitu Bapak Dodi Kurniawan selaku Assistant Manager TJSL. Akibat jadwal beliau yang padat, wawancara harus dijadwal ulang beberapa kali hingga akhirnya berhasil dilaksanakan pada 13 Juni 2025. Dari wawancara inilah peneliti berhasil mendapatkan konfirmasi dan data primer mengenai tiga program utama CSR PLN di Kelurahan Purus.

Secara kronologis, wawancara dengan para informan lainnya dilaksanakan secara bertahap, diselingi dengan proses bimbingan dan analisis data awal. Setelah data primer terkumpul, peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Syuhendri pada 28 Juni 2025 untuk mendalami informasi spesifik mengenai pendampingan pasca-pelatihan menjahit, sebagai bagian dari upaya triangulasi dan pendalaman data.

1.6.6 Unit Analisis,

Dalam penelitian kualitatif, unit analisis data berperan penting untuk memastikan bahwa fokus kajian tetap jelas dan terarah. Unit analisis membantu peneliti menentukan objek yang akan diteliti dan memperjelas batasan-batasan penelitian. Dengan menetapkan unit analisis, peneliti bisa menentukan siapa atau apa yang menjadi pusat perhatian dalam pengumpulan data, serta aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam penelitian. Misalnya, unit analisis bisa berupa individu, yang berarti data akan difokuskan pada pengalaman atau perspektif seseorang. Jika unit analisis berupa kelompok atau organisasi, penelitian berfokus pada dinamika kelompok atau struktur organisasi. Bahkan, waktu tertentu juga bisa menjadi unit analisis, misalnya ketika peneliti ingin memahami perubahan yang terjadi dalam kurun waktu spesifik. Pemilihan unit analisis yang tepat sesuai dengan topik penelitian sangat krusial karena akan mempengaruhi keseluruhan proses dan hasil penelitian.

Unit analisis dari penelitian ini adalah kelompok, yaitu kelompok-kelompok yang terlibat dalam program CSR PT. PLN (Persero) di Kelurahan Purus. Fokus penelitian ini adalah pada pengalaman, persepsi, dan dinamika yang terjadi antara kelompok-

kelompok tersebut. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji hubungan antara PT. PLN (Persero) sebagai kelompok pemberi bantuan, dengan kelompok masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Purus (seperti kelompok peserta pelatihan menjahit dan Komunitas Tanah Ombak). Melalui analisis terhadap dinamika antar kelompok inilah, peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor hambatan dalam pemanfaatan bantuan CSR PT. PLN (Persero).

1.6.7 Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling berkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dan data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi (Afrizal, 2014). Dalam menganalisis data, peneliti menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu, dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok tersebut. Analisis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Ia membagi analisis data menjadi tiga tahap secara garis besar, yaitu:

a. Kodifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan di lapangan ditulis kembali dan diberikan nama atau pengkodean terhadap data yang telah diperoleh. Peneliti dapat mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga peneliti dapat membedakan mana informasi yang penting dan tidak penting. Informasi penting merupakan informasi yang sesuai dengan topik penelitian, sedangkan pernyataan informan yang tidak berkaitan

dengan pernyataan informan dianggap sebagai data yang tidak penting. Hasil dari tahap kodifikasi data ini ialah memperoleh tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian (Afrizal, 2014). Dari klasifikasi ini maka peneliti memfokuskan interpretasinya terhadap penggalan informasi yang dianggap penting dan relevan dengan tujuan penelitiannya.

b. Tahap penyajian data

Tahap penyajian data merupakan tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan (Afrizal, 2014). Dalam hal ini Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian karena dianggap lebih efektif dibandingkan dengan naratif. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat dengan mudah melihat hasil catatan lapangannya dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan

Dalam tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data dari suatu wawancara atau sebuah dokumen di lapangan (Afrizal, 2014). Setelah menarik kesimpulan, peneliti kemudian mengecek lagi keabsahan interpretasi dengan mengecek ulang kodifikasi dan penyajian data pada tahap yang dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan dalam analisis data.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi penelitian, yang dicirikan oleh adanya unsur-unsur seperti pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat

diobservasi. Menurut (Afrizal, 2014) lokasi penelitian tidak harus dalam pengertian teritorial administratif, melainkan juga bisa mengacu pada ruang dimana aktivitas permasalahan penelitian berlangsung. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah kelurahan Purus Kota Padang. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan terdapat beberapa program CSR yang sudah dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero).

1.6.9 Definisi Operasional Konsep

1. Hambatan Pemanfaatan

Hambatan pemanfaatan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai segala bentuk rintangan yang menyebabkan bantuan CSR dari PT. PLN (Persero) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk mengukur tingkat ketidakoptimalan ini, penelitian ini meminjam prinsip dari kerangka *Social Return on Investment* (SROI) secara kualitatif. Ketidakoptimalan diartikan sebagai adanya kesenjangan yang signifikan antara hasil yang diharapkan (*intended outcome*) dari program CSR dengan hasil nyata (*actual outcome*) yang terjadi di masyarakat. Analisis akan berfokus pada identifikasi *input* (investasi program), *output* (keluaran langsung), dan *outcome* (perubahan nyata) untuk menunjukkan di mana nilai sosial dari program tersebut hilang atau tidak tercapai. Hambatan ini terbagi ke dalam dua dimensi utama. Pertama, hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari sistem, kebijakan, serta mekanisme program CSR itu sendiri, misalnya desain program yang tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan, lemahnya koordinasi, hingga ketiadaan mekanisme pendampingan berkelanjutan. Kedua, hambatan kultural, yaitu hambatan yang berasal dari nilai,

norma, kebiasaan, dan pola pikir yang mengakar dalam masyarakat Kelurahan Purus, yang tercermin dalam sikap pragmatis mengharapkan hasil instan, rendahnya inisiatif untuk berkembang, serta kurangnya rasa kepemilikan terhadap program yang diberikan. Dengan mengkaji hambatan pemanfaatan ini, penelitian berupaya menelaah faktor-faktor yang menyebabkan bantuan CSR PLN belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kelurahan Purus.

2. Bantuan

Bantuan mengacu pada berbagai bentuk dukungan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) melalui program PLN Peduli kepada penerima bantuan di Kelurahan Purus. Bantuan ini dapat berupa dukungan finansial, penyediaan peralatan, pelatihan, fasilitas usaha, atau bentuk dukungan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan.

3. CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui tindakan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, CSR merujuk pada program dan inisiatif yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) di Kelurahan Purus, Kota Padang.

4. *Social Return on Investment* (SROI)

Social Return on Investment (SROI) dalam penelitian ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan memahami tingkat keberhasilan atau

ketidakefektifan dari program CSR PT. PLN (Persero). Berbeda dengan penggunaan kuantitatifnya yang mengukur nilai finansial, dalam penelitian ini SROI digunakan secara kualitatif untuk menganalisis alur perubahan sosial yang dihasilkan oleh program. Analisis ini dilakukan dengan membedah tiga komponen utama:

- a. *Input*: Merujuk pada semua sumber daya yang diinvestasikan oleh PT. PLN ke dalam program, seperti dana, peralatan (contoh: mesin jahit, motor listrik), dan waktu.
- b. *Output*: Merujuk pada keluaran langsung dan terukur dari kegiatan program, seperti jumlah peserta yang dilatih atau jumlah fasilitas yang dibangun.
- c. *Outcome*: Merujuk pada perubahan nyata, baik positif maupun negatif, yang dialami oleh masyarakat sebagai akibat dari program. Ini adalah dampak jangka panjang yang menjadi fokus utama untuk menilai apakah sebuah program berhasil atau tidak.

Dengan kerangka ini, ketidakefektifan pemanfaatan bantuan didefinisikan sebagai adanya kesenjangan yang signifikan antara input dan output yang besar dengan outcome yang minimal atau bahkan nihil.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama sepuluh bulan, mulai dari bulan Oktober 2024 hingga Agustus 2025. Berikut adalah tabel tahapan penelitian yang telah dilaksanakan:

Tabel 1. 4 Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2024-2025											
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	
1.	Menyusun Instrumen Penelitian	■	■	■			■						
2.	Pengumpulan Data	■			■	■	■	■	■				
3.	Analisis Data						■	■	■	■			
4.	Penulisan Laporan dan Bimbingan								■	■	■		
5.	Ujian Skripsi											■	